

PENGARUH PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA, TRANSPARANSI, PELAPORAN/PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH BIREUEN

Indra Mauliya¹

Muhammad Haykal², Hendra Raza³, Nur Afni Yunita⁴

indra.200420019@mhs.unimal.ac.id¹, mhaykal@unimal.ac.id², hendra.raza@unimal.ac.id³,

nurafni.yunita@unimal.ac.id⁴

*Program Studi Akuntansi, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe
Kampus Bukit Indah, Blangpulo, Kec. Muara Satu, Lhokseumawe*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja, transparansi, pelaporan/pertanggungjawaban terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Bireuen. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 34 satuan kerja peringkat daerah (SKPD). Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu menggunakan teknik purposive sampling sesuai dengan kriteria sehingga sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 68 responden. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer dengan melakukan penyebaran kuisioner yang dikumpulkan kemudian diolah dengan software SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel anggaran berbasis kinerja tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Bireuen, variabel transparansi berpengaruh dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Bireuen, variabel pelaporan/pertanggungjawaban tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Bireuen. Untuk variabel anggaran berbasis kinerja, transparansi, pelaporan/pertanggungjawaban berpengaruh dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Bireuen.

Kata kunci : *Performance-Based Budgeting, Transparency, Reporting/accountability, Accountability for the Performance of Government Agencies*

Abstract

This research aims to examine the effect of implementing performance-based budgeting, transparency, reporting/accountability on performance accountability of Bireuen regional government agencies. The population in this study consisted of 34 regional work units (SKPD). The sampling technique used was purposive sampling technique in accordance with the criteria so that the sample used in this research was 68 respondents. This research is quantitative research using primary data by distributing questionnaires which are collected and then processed using SPSS software. The results of the research show that the performance-based budget variable has no influence and is not significant on the accountability of the performance of Bireuen regional government agencies, the transparency variable has an influence and is significant on the accountability of the performance of Bireuen regional government agencies, the reporting/accountability variable has no effect and is not significant on the accountability of the performance of Bireuen regional government agencies. For performance-based budget variables, transparency, reporting/accountability have a significant and significant impact on the accountability of the performance of Bireuen regional government agencies.

Keywords : *independent board of commissioners, audit commite, institutional ownership, board of directors, company size, profitability and company financial performance.*

PENDAHULUAN

Akuntabilitas kinerja merupakan suatu yang sangat penting dalam meningkatkan kinerja pegawai, karena akuntabilitas kinerja adalah kunci untuk mewujudkan *good governance* dalam pengelolaan suatu organisasi publik, terkait dengan anggaran berbasis kinerja, transparansi, pelaporan/pertanggungjawaban dalam suatu sumber yang didasarkan oleh publik. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. (Nurkholis 2019;197).

Anggaran berbasis kinerja adalah sistem penganggaran yang berkaitan dengan visi, misi, dan rencana strategis serta berorientasi pada *output* organisasi (Bastian, 2010).

Menurut Hood (2010), transparansi mengacu kepada sikap yang mencerminkan dalam hal pembuatan kebijakan, peraturan dan informasi lain agar dapat tampak dari luar, artinya segala hal terkait dengan keputusan, peraturan maupun informasi lain dapat dipantau oleh pihak yang berada diluar proses pembuatan keputusan maupun informasi tersebut. Adrianto (2012) yang menyimpulkan bahwa transparansi berpengaruh positif pada pengelolaan anggaran. Sehingga di dalam tata kelola anggaran publik tidak terlepas dari prinsip transparansi.

Pelaporan/pertanggungjawaban dalam hal ini mencakup besarnya alokasi anggaran unit kerja, besarnya anggaran yang telah dikeluarkan serta pencapaian hasil kerja atau kegiatan ataupun program yang telah dilaksanakan (Mardiasmo, 2006).

Akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan perwujudan kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pencapaian visi dan misi pemerintah yang diwujudkan melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Bireuen Tahun 2019 menyajikan Akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Bireuen dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah melalui berbagai kegiatan pembangunan baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang menjadi kewenangannya.

Berdasarkan dari pernyataan dalam susunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bireuen yang harus mencapai hasil kinerja dengan didasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang sesuai dan mencapai target yang telah ditetapkan. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan pemerintah Kota Bireuen menjadikan hasil yang memperlihatkan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh APBD menampilkan laporan yang baik, pada tahun 2020, yang berdasarkan LHP BPK-RI, temuan-temuan pada Tahun Anggaran 2020 menjadi bahan dan acuan analisis yang serius dilakukan, terkait penggunaan Dana *Refocusing* di Rumah Sakit Umum Dr Fauziah, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta kekurangan volume pekerjaan di beberapa Dinas terkait, bahkan yang parahnya keterlambatan pembayaran gaji 13 PNS yang tersandung hukum. (<https://www.lintasnasional.com/membaca-nalar-analisis-dprk-bireuen-terhadap-lkpd-dan-lhp-bpk-tahun-2020/>). Fenomena tersebut merupakan sesuatu yang bisa mempengaruhi akuntabilitas kinerja pada Instansi Pemerintah Daerah Kota Bireuen, dan juga tidak mewujudkan *good governance* dalam pengelolaan organisasi publik.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Zahra Fonna (2022) meneliti "Pengaruh penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara". perbedaan penelitian ini adalah pada lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini di instansi pemerintah Bireuen sedangkan Zahra Fonna di Satuan Perangkat kerja pemerintah Kabupaten Aceh Utara.

Penelitian mengenai akuntabilitas yang dilakukan oleh Zahra Fonna (2022) menyatakan bahwa anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penelitian Delevida Sary Simorangkir (2021) menyatakan bahwa transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan penelitian yang diteliti oleh Mirna Lirda et all (2023) menunjukkan pelaporan Pertanggungjawaban berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mengetahui Transparansi Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mengetahui Pelaporan/Pertanggungjawaban Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Untuk mengetahui Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Transparansi, Pelaporan/Pertanggungjawaban, Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Teori

Teori Agency Theory

Konsep akuntabilitas dapat dijelaskan menggunakan *agency theory*, dimana dalam pengertian luas akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah dalam hal ini pemerintah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah dalam hal ini masyarakat yang diwakili oleh DPR (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban.

Pengertian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Menurut Mardiasmo (2022) akuntabilitas adalah suatu bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Pengertian Anggaran Sektor Publik

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang akan dicapai oleh suatu organisasi dalam periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran moneter (Mahsun dkk, 2013). anggaran sektor publik dirancang untuk membantu pemerintah dalam memperbaiki kinerja instansi pemerintah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga, anggaran sektor publik dipergunakan sebagai tolak ukur dalam setiap program yang dilakukan oleh pemerintah.

Anggaran Berbasis Kinerja

Anggaran berbasis kinerja merupakan sistem penganggaran yang berorientasi pada *output* organisasi yang berkaitan sangat erat dengan visi, misi, dan rencana strategis organisasi (Endrayani, et al 2014).

Pengertian Transparansi

Tahir (2011) memberikan pendapat tentang pengertian transparansi adalah bentuk keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan dan merupakan salah satu syarat penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.

Hubungan Antar Variabel

Hubungan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

Anggaran berbasis kinerja adalah sistem penganggaran manajemen dalam mengaitkan pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan dengan *output* serta hasil yang diharapkan (Halim, 2007). Dengan penerapan anggaran berbasis kinerja yang baik diharapkan dapat mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik. Adanya hubungan yang jelas antara pengeluaran dan hasil yang hendak dicapai maka akan memudahkan terciptanya transparansi sehingga masyarakat akan dengan mudah untuk mengawasi kinerja pemerintah. Dengan begitu, akan terpenuhi pula akuntabilitas publik terkait kewajiban untuk menjelaskan dan menjawab mengenai apa yang telah, sedang, dan akan dilakukan oleh instansi pemerintah.

Hubungan Transparansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

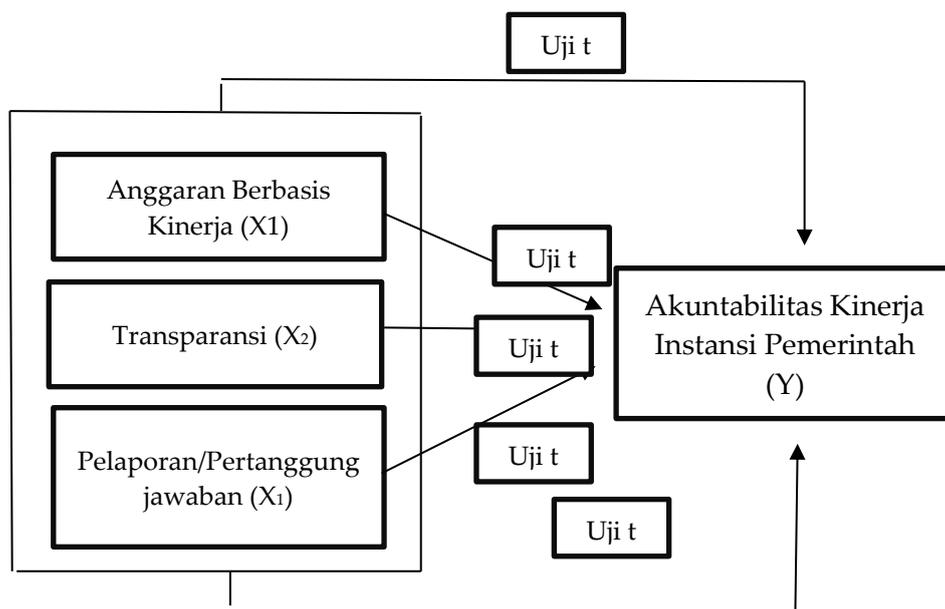
Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Pengaruh transparansi terhadap akuntabilitas yaitu transparansi merupakan keterbukaan pemerintah daerah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat.

Hubungan Pelaporan/ Pertanggungjawaban Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Pedoman penyusunan APBD Berbasis kinerja Deputi IV BPKP (2005:16) mengatakan bahwa “akhir tahun anggaran setelah program dan kegiatan selesai dilaksanakan, manajemen membuat laporan kinerja meliputi laporan keuangan berupa realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan dan laporan kinerja non- keuangan untuk dapat digunakan sebagai masukan untuk melakukan perbaikan di tahun berikutnya dan sebagai pertanggungjawaban kepada publik atas dana yang digunakan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah”. Dengan adanya pelaporan/pertanggungjawaban yang dilakukan pada setiap perintah maka dengan itu berpengaruh terhadap akuntabilitas instansi pemerintah yang telah mempertanggungjawabkan hasil laporan keuangan dengan baik.

Hipotesis

- H1 : Perencanaan Anggaran berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- H2 : Transparansi berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- H3 : Pertanggungjawaban Anggaran berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- H4 : Anggaran Berbasis Kinerja, Transparansi, Pelaporan/Pertanggungjawaban, berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Kerangka Konseptual**METODE****Lokasi dan Objek Penelitian**

Lokasi penelitian dimana tempat bagi peneliti melakukan penelitiannya. Tempat dalam penelitian ini adalah di Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Bireuen.

Populasi

Populasi adalah keseluruhan elemen yang akan dijadikan wilayah generalisasi. Sugiyono (2017), menyatakan bahwa populasi adalah obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu (2017 yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut Sugiarto), populasi adalah sekumpulan individu yang memiliki karakteristik khas yang menjadi perhatian dalam lingkup yang ingin diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai negeri di SKPD (Satuan Kerja Pegawai Daerah) Bireuen yang berjumlah 34 instansi pemerintah.

Sampel

Menurut Sugiyono (2009), sampel penelitian adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel dalam penelitian ini yaitu pada dinas- dinas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Bireuen.

Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang berupa jawaban responden terhadap item- item pertanyaan yang terdapat dalam 5 (lima) instrumen penelitian

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi dan studi pustaka. Metode dokumentasi merupakan pengumpulan data yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Metode Studi pustaka merupakan pengumpulan data untuk mendapatkan pedoman kepustakaan dengan mengamati berbagai macam jurnal, buku serta penelitian terdahulu.

Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel penelitian terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. Adapun variabel bebas dalam penelitian ini adalah variabel penerapan anggaran berbasis kinerja yang terdiri dari variabel anggaran berbasis kinerja, transparansi, pelaporan/ pertanggungjawaban, serta variabel terikatnya adalah akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Definisi operasional dan pengukuran variabel sebagai berikut:

Variabel Independen

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lainnya (variabel dependen). Terdapat 3 variabel, yaitu:

1. Anggaran Berbasis Kinerja (X_1)

Anggaran berbasis kinerja adalah anggaran yang disusun dengan menghubungkan pengeluaran dari hasil yang akan dicapai, mengidentifikasi *input*, *output* dan *outcome* yang dihasilkan oleh suatu program dan kegiatan.

2. Tranparansi (X_2)

Transparansi adalah keterbukaan dari pemerintah terkait aspek pelayanan publik yang pada akhirnya menjadikan pemerintah bertanggungjawab terhadap semua pihak yang berkepentingan dengan proses maupun kegiatan pada organisasi sektor publik.

3. Pelaporan/ Pertanggungjawaban (X_3)

Pelaporan dalam hal ini mencakup besarnya alokasi anggaran unit kerja, besarnya anggaran yang telah dikeluarkan serta pencapaian hasil kerja atau kegiatan ataupun program yang telah dilaksanakan.

Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Di Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Pengukuran Instrumen Penelitian

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian validitas dilakukan dengan melakukan korelasi bivariate antara masing – masing skor indikator dengan total skor konstruk. Hasil analisis korelasi bivariate dengan melihat output Pearson Correlation (Ghozali, 2009). Dengan kriteria jika nilai sig. (2-tailed) pada total skor konstruk < 0,05 item pertanyaan/pertanyaan dikatakan valid.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur handal atau tidaknya kuesioner yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian. Suatu kuesioner dikatakan handal jika jawaban responden terhadap pertanyaan adalah konsisten dari waktu ke waktu. Dengan demikian uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui konsisten/tidaknya responden terhadap kuesioner-kuesioner penelitian.

Pengujian Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah analisis yang dilakukan untuk menilai apakah di dalam sebuah model regresi linier terdapat masalah – masalah asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, uji heterokedasitas.

Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2016) menyatakan bahwa : “Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah

dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal". Dengan kata lain, uji normatif dilakukan untuk mengetahui sifat distribusi data penelitian yang berfungsi untuk mengetahui apakah sampel yang diambil normal atau tidak dengan menguji sebaran data yang dianalisis.

Uji Heteroskedastisitas

Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual dari suatu pengamatan ke 33 pengamatan lainnya tetap, maka disebut Homoskedastisitas, dan jika varian berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadinya heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat grafik.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antara variabel independen. Multikolinieritas dapat dilihat pada tolerance value atau Variance Inflation Factor (VIF). Apabila tolerance value dibawah 0,10 atau nilai VIF diatas 10 maka terjadi multikolinieritas. Apabila ternyata terdapat multikolinieritas, maka salah satu variabel harus dikeluarkan dari persamaan (Ghozali,2016).

Analisis Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui hubungan fungsional antara variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Bentuk persamaan regresi linier berganda menurut Nugroho (2011:92), sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4$$

Keterangan:

Y : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

X1 : Anggaran Berbasis Kinerja

X2 : Transparansi

X3 : Pelaporan/Pertanggungjawaban Anggaran

β_0 : Konstanta

β : Koefisien regresi

Pengujian Hipotesis

Pengujian Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali : 2016)

Pengujian Simultan (Uji f)

Uji statistik F juga menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji statistik F mempunyai signifikansi 0,05 (Ghozali, 2016).

Koefisien Determinasi (R²)

Menurut Ghozali (2016), uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R² yang kecil 34 menunjukkan bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas.

PEMBAHASAN

Gambaran Umum Penelitian

Kabupaten Bireuen merupakan salah satu daerah otonom yang termasuk dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah satuan kerja yang mempunyai peran penting dalam mendukung akuntabilitas dan transparansi dalam penyajian laporan keuangan daerah.

Karakteristik Responden

Tabel 4. 1 Proses Pengumpulan Data Kuisisioner

No	Keterangan	Jumlah Kuisisioner	Presentase
1	Distribusi Kuisisioner	68	100%
2	Kuisisioner Yang Kembali	0	0%
3	Kuisisioner Yang dapat Diolah	68	100%

Adapun karakteristik responden dalam penelitian ini, yaitu dengan menentukan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, lama bekerja, dan jabatan. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. 2 Karakteristik Responden

Pengelompokan Data		Frekuensi	Presentase
			100%
Jenis Kelamin	Pria	29	43%
	Perempuan	39	57%
Usia	<25 Tahun	0	0%
	25-35 Tahun	12	18%
	36-46 Tahun	28	41%
	>45 Tahun	28	41%
Tingkat Pendidikan	D3	17	25%
	S1	48	71%
	S2	3	4%
	S3	0	0%
Lama Bekerja	< 5 Tahun	11	16%
	5 – 10 Tahun	10	15%
	> 10 Tahun	47	69%
Jabatan	Kasug Bag Keuangan	34	50%
	Bendahara	34	50%

Sumber: Data Primer, Diolah oleh penulis 2024

Hasil Uji Analisis Deskriptif

Tabel 4. 3 Data Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Anggaran berbasis kinerja	68	32.00	50.00	43.0882	3.67621
Transparansi	68	24.00	30.00	27.5000	1.75771

Pelaporan/pertanggungjawaban	68	18.00	25.00	22.0000	2.07328
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	68	36.00	50.00	42.9118	3.88159
Valid N (listwise)	68				

Sumber: Data Primer, Diolah oleh penulis 2024

Berdasarkan Hasil Uji Deskriptif diatas, dapat kita gambarkan distribusi data yang didapat oleh peneliti adalah:

1. Variabel Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (X_1), dari data diatas tersebut bisa di deskripsikan bahwa nilai minimum 32 sedangkan nilai maksimum sebesar 50, nilai rata-rata X_1 sebesar 43.0882 dan Standar Deviasi data Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja adalah sebesar 3.67621
2. Variabel Transparansi (X_2), berdasarkan data diatas tersebut bisa di deskripsikan bahwa nilai minimum 24 sedangkan nilai maksimum sebesar 30, nilai rata-rata X_2 sebesar 27.5000 dan Standar Deviasi data Transparansi adalah sebesar 1.75771
3. Variabel Pelaporan/pertanggungjawaban (X_3), dari data diatas bisa di deskripsikan bahwa nilai minimum 18 sedangkan nilai maksimum sebesar 25, nilai rata-rata X_3 sebesar 22.0000 dan Standar Deviasi data Pelaporan/pertanggungjawaban adalah sebesar 2.07328.
4. Variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Y), dari hasil data diatas bisa disimpulkan bahwa nilai minimum 36 sedangkan nilai maksimum sebesar 50, nilai rata-rata Y sebesar 42.9118 dan Standar Deviasi data Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah adalah sebesar 3.88159.

Hasil Uji Instrumen Penelitian

Hasil Uji Validitas

Tabel 4. 4 Hasil Uji Validitas Anggaran Berbasis Kinerja

5.

Variabel	Item Pernyataan	Nilai R Tabel	Nilai R Hitung	Keterangan
Anggaran Berbasis Kinerja	X1_1	0,3117	0,616	VALID
	X1_2	0,3117	0,630	VALID
	X1_3	0,3117	0,739	VALID
	X1_4	0,3117	0,574	VALID
	X1_5	0,3117	0,518	VALID
	X1_6	0,3117	0,732	VALID
	X1_7	0,3117	0,728	VALID
	X1_8	0,3117	0,816	VALID
	X1_9	0,3117	0,816	VALID
	X1_10	0,3117	0,816	VALID

Sumber: Data Primer, Diolah oleh penulis 2024

Tabel 4. 5 Hasil Uji Validitas Transparansi

Variabel	Item Pernyataan	Nilai R Tabel	Nilai R Hitung	Keterangan
Transparansi	X2_1	0,3117	0,598	VALID
	X2_2	0,3117	0,598	VALID
	X2_3	0,3117	0,701	VALID
	X2_4	0,3117	0,547	VALID
	X2_5	0,3117	0,555	VALID
	X2_6	0,3117	0,433	VALID

Sumber: Data Primer, Diolah oleh penulis 2024

Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas Pelaporan/Pertanggungjawaban

Variabel	Item Pernyataan	Nilai R Tabel	Nilai R Hitung	Keterangan
Pelaporan/ Pertanggungjawaban	X3_1	0,3117	0,367	VALID
	X3_2	0,3117	0,735	VALID
	X3_3	0,3117	0,737	VALID
	X3_4	0,3117	0,850	VALID
	X3_5	0,3117	0,846	VALID

Data Primer, Diolah oleh penulis 2024

Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Variabel	Item Pernyataan	Nilai R Tabel	Nilai R Hitung	Keterangan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Y_1	0,3117	0,663	VALID
	Y_2	0,3117	0,632	VALID
	Y_3	0,3117	0,581	VALID
	Y_4	0,3117	0,750	VALID
	Y_5	0,3117	0,609	VALID
	Y_6	0,3117	0,786	VALID
	Y_7	0,3117	0,789	VALID
	Y_8	0,3117	0,789	VALID
	Y_9	0,3117	0,786	VALID
	Y_10	0,3117	0,765	VALID

Uji Reabilitas

Uji reabilitas menunjukkan konsistensi dan stabilitas satu skor dari suatu instrumen pengukuran. Uji reabilitas hanya dilakukan pada pertanyaan yang dianggap sah. Koefisien *cronbach's alpha* lebih besar dari 0,6. Selain itu *cronbach's alpha* yang semakin mendekati 1 menunjukkan semakin tinggi konsistensi internal reabilitasnya. Adapun hasil pengujian validitas dapat dilihat pada berikut:

Tabel 4.8. Hasil Uji Reabilitas Anggaran Berbasis Kinerja (X1)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N Of Items
.881	10

Sumber: Diolah, SPSS 29

Tabel 4.9 Hasil Uji Reabilitas Transparansi (X2)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N Of Items
.578	6

Sumber: Diolah, SPSS 29

Tabel 4.10 Hasil Uji Reabilitas Pelaporan/Pertanggungjawaba (X3)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N Of Items
.774	5

Tabel 4. 11 Hasil Uji Reabilitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N Of Items
.861	10

Sumber: Diolah, SPSS 29

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non-parametik Kolmogrov-Smirnov (K-S). Jika hasil Kolmogrov Smirnov menunjukkan nilai signifikan di atas 0,05 maka data residual terdistribusi normal.

Tabel 4. 12 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
N		Unstandardized Residual	
		68	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	3.59087264	
Most Extreme Differences	Absolute	.087	
	Positive	.087	
	Negative	-.059	
Test Statistic		.087	
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.200 ^d	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e	Sig.	.219	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.208
		Upper Bound	.230
a. Test distribution is Normal.			
b. Calculated from data.			
c. Lilliefors Significance Correction.			
d. This is a lower bound of the true significance.			
e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.			

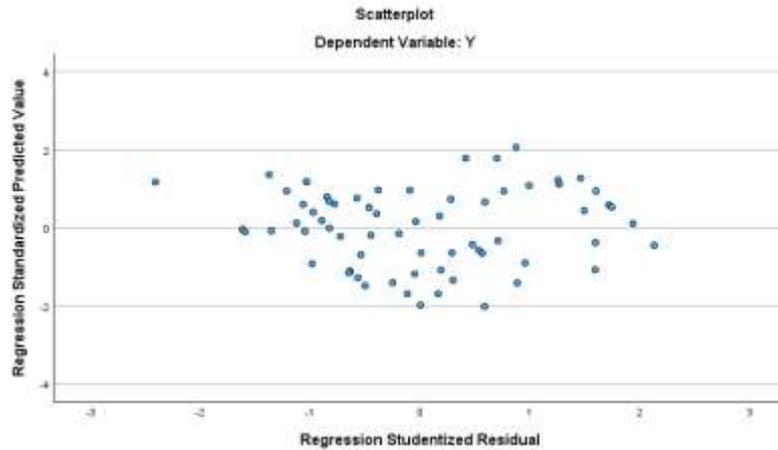
Sumber: Diolah, SPSS 29 2024

Berdasarkan data pada tabel di atas pada signya terdapat nilai sebesar 0,200 yang artinya lebih besar dari 0,05 maka data dikatakan normal tidak terjadi masalah normalitas.

Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap, maka disebut homoskedastisitas. Jika *variance* berbeda, maka disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heterokedastisitas. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat grafik.

Tabel 4. 13 Hasil Uji Heterokedastisitas



sumbu Y dan tidak terlihat pola tertentu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode ini tidak ada gejala atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam mode regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen. Multikolinearitas dapat dilihat pada *tolance value* atau *variance inflation factor* (VIF). Berikut adalah hasil uji multikolinearitas:

Tabel 4. 14 Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	14.653	8.881		1.650	.104		
	X1	.089	.129	.084	.690	.492	.898	1.113
	X2	.723	.262	.327	2.758	.008	.950	1.053
	X3	.207	.223	.110	.928	.357	.944	1.059

A. Dependent Variable: Y

Sumber: Diolah, SPSS 29 202

Berdasarkan data di atas dengan nilai tolerance pada variabel X1, X2, X3 >0,10 maka dapat diartikan bahwa data tersebut tidak terjadi gejala multikolinearitas. Berdasarkan data di atas dengan nilai vif pada variabel X1, X2, X3 < 10 maka dapat diartikan bahwa data tersebut tidak terjadi gejala multikolinearitas.

Hasil Uji Analisis Data

Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda adalah analisis yang digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh antara dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 4. 15. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	14.653	8.881		1.650	.104
	X1	.089	.129	.084	.690	.492
	X2	.723	.262	.327	2.758	.008
	X3	.207	.223	.110	.928	.357

A. Dependent Variable: Y

Sumber: Diolah, SPSS 29 2024

Dari hasil analisis data di atas, dapat dilihat koefisien regresi yang akan dipakai tertera di dalam kolom B. Berdasarkan hasil di atas dapat disusun model regresi seperti berikut:

$$\text{Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah} = 14.653 + 0,89 \text{ Anggaran Berbasis Kinerja} + 0,723 \text{ Tranparansi} + 0,207 \text{ Pelaporan/Pertanggungjawaban} + e$$

Model regresi diatas memiliki interpretasi sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 14.653 memiliki arti bahwa apabila semua variabelindependen yaitu Anggaran Berbasis Kinerja, Transparansi, Pelaporan/Pertanggungjawaban, bernilai 0, maka Akuntabilitas Kinerja Pemerintah memiliki nilai sebesar 14.653.
2. Nilai koefisien Anggaran Berbasis Kinerja sebesar 0,89 memiliki arti bahwa apabila variabel Perencanaan Anggaran mengalami kenaikan sebesar 1 kali maka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah akan mengalami kenaikan sebesar 0,89.
3. Nilai koefisien Pelaksanaan Anggaran sebesar 0,723 memiliki arti bahwa apabila variabel Transparansi mengalami kenaikan sebesar 1 kali maka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah akan mengalami kenaikan sebesar 0,723.
4. Nilai koefisien Pelaporan/Pertanggungjawaban sebesar 0,207 memiliki arti bahwa apabila variabel Pelaporan/Pertanggungjawaban mengalami kenaikan sebesar 1 kali maka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah akan mengalami kenaikan sebesar 0,207.

Hasil Uji Hipotesis

Uji t

Uji t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen dan digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikansi 0,05. Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 16 Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	14.653	8.881		1.650	.104
	X1	.089	.129	.084	.690	.492
	X2	.723	.262	.327	2.758	.008
	X3	.207	.223	.110	.928	.357

A. Dependent Variable: Y

Sumber: Diolah, SPSS 29 2024

Berdasarkan tabel di atas maka:

- 1 Pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
 Pada tabel Anggaran mendapatkan nilai signifikasi (sig) sebesar 0,492 maka H1 ditolak karena nilai sig > dari 0,05, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Anggaran Berbasis Kinerja tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 2 Pengaruh Transparansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
 Pada tabel transparansi mendapatkan nilai signifikasi (sig) sebesar 0,008 maka H2 diterima karena nilai sig < dari 0,05, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Transparansi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 3 Pengaruh Pelaporan/Pertanggungjawaban terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
 Pada tabel Pelaporan/Pertanggungjawaban Anggaran mendapatkan nilai signifikasi (sig) sebesar 0,357 maka H2 ditolak karena nilai sig > dari 0,05, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pelaporan/Pertanggungjawaban Anggaran tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Uji f

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat.

Tabel 4. 17 Hasil Uji f

Anova ^a						
	Model	Sum Of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	145.548	3	48.516	3.594	.018 ^b
	Residual	863.923	64	13.499		
	Total	1009.471	67			
A. Dependent Variable: Y						
B. Predictors: (Constant), X ₃ , X ₂ , X ₁						

Sumber: Diolah, SPSS 29 2024

Uji F dimana nilai signifikan (sig) kurang dari 0,05 yaitu 0,018 < 0,05, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen dalam penelitian ini secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka H4 diterima.

Hasil

Uji Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa besar keterkaitan antara variabel independen dan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 sampai dengan 1.

Tabel 4. 18 Hasil Uji Determinasi (R²)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.380 ^a	.144	.104	3.67407
a. Predictors: (Constant), X ₃ , X ₂ , X ₁				
b. Dependent Variable: Y				

Pembahasan

Kode	Hipotesis	Hasil
H ₁	Anggaran Berbasis Kinerja (H ₁) tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Ditolak
H ₂	Transparansi (H ₂) berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Diterima
H ₃	Pelaporan/Pertanggungjawaban (H ₃) tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Ditolak
H ₅	Anggaran Berbasis Kinerja, Transparansi, Pelaporan/Pertanggungjawaban berpengaruh secara simultan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Diterima

1. Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja (H₁) tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan hasil uji parsial perencanaan anggaran tidak berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa anggaran berbasis kinerja tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2. Pengaruh Transparansi (H₂) berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hasil penelitian ini menyatakan transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yaitu transparansi merupakan keterbukaan pemerintah daerah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat.

3. Pengaruh Pelaporan/Pertanggungjawaban (H₃) tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Terbuktinya hipotesis ini tidak sejalan dengan Pedoman penyusunan APBD Berbasis kinerja Deputy IV BPKP (2005:16) mengatakan bahwa "akhir tahun anggaran setelah program dan kegiatan selesai dilaksanakan, manajemen membuat laporan kinerja meliputi laporan keuangan berupa realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan dan laporan kinerja non-keuangan untuk dapat digunakan sebagai masukan untuk melakukan perbaikan di tahun berikutnya dan sebagai pertanggungjawaban kepada publik atas dana yang digunakan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah".

4. Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja, Transparansi, Pelaporan/Pertanggungjawaban berpengaruh secara simultan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian lucky (2015) dan wawan (2016) menyatakan bahwa Perencanaan anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Pelaporan/Pertanggungjawaban Anggaran, dan Evaluasi Kinerja berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini mengenai Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Transparansi, Pelaporan/Pertanggungjawaban Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Bireuen. Berikut beberapa simpulan yang dapat penulis simpulkan dari hasil penelitian ini :

1. Anggaran Berbasis Kinerja tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kota Bireuen, H₁ ditolak.
2. Transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kota Bireuen, H₂ diterima.
3. Pelaporan/Pertanggungjawaban tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kota Bireuen. H₃ ditolak.

4. Anggaran Berbasis Kinerja, transparansi, pelaporan / pertanggungjawaban berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kota Bireuen, H₄ diterima.

Saran

Beberapa saran yang perlu dikemukakan adalah :

1. Saran Pemerintah Kabupaten Bireuen

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Satuan Kerja Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Kabupaten Bireuen agar lebih memperhatikan pada faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pembuatan perencanaan anggaran pemerintah Kabupaten Bireuen, sebaiknya lebih mengutamakan membuat program atau kegiatan yang sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Bireuen, agar masyarakat dapat memperoleh manfaat dari anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat dan perencanaan yang sudah dibuat bisa di terapkan dengan baik pada tahun tahun yang akan datang, sehingga terciptanya *good governance* pemerintah daerah yang baik dan *good goverment* serta akuntabilitas kinerja daerah tercapai.

2. Saran bagi peneliti selanjutnya

- a. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti masalah yang sama , dianjurkan meneliti pada subjek yang lain, dengan variabel-variabel yang lain yang berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diantaranya : kejelasan sasaran anggaran berbasis kinerja, transparansi, pelaporan/pertanggungjawaban terhadap akuntabilitas kienerja instansi pemerintah.
- b. Untuk peneliti selanjutnya di era *new normal* ini sebaiknya dalam penyebaran kuisioner menggunakan *google form* untuk mempermudah dalam penyebarannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi (2014) pengaruh perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan/ pertanggungjawaban anggaran dan evaluasi kinerja terhadap akuntabilitas instansi pemerintah toba samosir. <http://eprints.umpo.ac.id/1306/>.
- Bachtiar, 2020. Pengaruh Pelaksanaan Anggaran Dan Evaluasi Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Berau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 2005. Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja (Revisi). BPKP. Jakarta.
- Bangun Erlangga Ibrahim, 2019 . Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2018 (Studi Kasus Di Desa Kemiri Lor Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo). *Tesis Thesis, Stie Widya Wirwaha*.
- Basri, 2017. Sistem Akuntansi Sektor Publik, Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Bastian, 2010. Sistem Akuntansi Sektor Publik, Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Bastian, Indra, (2010) Akuntansi Sektor Publik, suatu pengantar. Edisi ketiga. Jakarta : Erlangga.
- Bastian. 2010. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja (Studi Empiris Koni Se Sumatera Barat)
- DEPUTI IV BPKP.(2005). Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja (Revisi).Jakarta:BPKP.
- Indrayani, at all. 2014. "Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus pada Dinas Kehutanan UPT KPH Bali Tengah Kota Singaraja)". E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014).
- Fazera (2017) Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Perusahaan BUMN PT.Pos Indonesia Kota Bandung.
- Ghozali, I. 2009. Ekonometrika: Teori Konsep dan Aplikasi dengan SPSS 17. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Ghozali, Imam. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25
- Halim dan Kusufi. 2014. Pengelolaan Keuangan Daerah (Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah). Edisi Ketiga, Cetakan Pertama. Yogyakarta: STIM YKPN.

- Halim, Abdul dan M. Syam Kusufi. (2014). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta. Salemba Empat. ———
- Hasniati 2016 . Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Helina 2019. “Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar”. Jurnal Riset Akuntansi, Vol. 12. e- ISSN: 2116-412.
- Indriani Yulia Friska (2015) pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderating (studi pada satuan kerja perangkat daerah provinsi jambi). <https://www.onlinejournal.unja.ac.id/jaku/article/view/2381/1707>.
- Keputusan Kepala LAN No.239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (2003). Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 239/IX/6/8/2003, Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- Komang, dkk, 2014. “Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kehutanan UPT KPH Bali Tengah Kota Singaraja”. (Jurnal Akuntansi; (online), Vol 2, No 1.
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara tahun 2020 (2021). Aceh Utara: Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
- Lindsay Amiel, 2014. “ Kinerja Aparatur Dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik Di Kantor Lurah Padang Lambe Kota Palopo”. Jurnal Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andi Djemma Palopo.
- Lucky (2015) pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (studi empiris pada SKPD kabupaten ponorogo). <http://eprints.umpo.ac.id/1306/>.
- Mahmudi, 2016. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: UII Press.
- Mardiasmo, 2018. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit : Andi
- Melfariza Sefryana (2014) pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kota Bengkulu. <http://repository.unib.ac.id/8192//>
- Nurkholis. 2019. Penganggaran Sektor Publik, Penerbit : Universitas Brawijaya Press, 2019
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (2007) Jakarta: Menteri Dalam Negeri.
- Peraturan Menteri Keuangan nomor 196 tahun 2008 tentang Laporan Realisasi Anggaran
- Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang akuntabilitas kinerja.
- Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang akuntabilitas kinerja.
- Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (2014) Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
- Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Pribadi. 2016. Akuntansi Manajemen. Yogyakarta
- Pribadi. 2016. Akuntansi Manajemen. Yogyakarta.
- Pusdiklatwas BPKP.2007. Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Edisi 5. Jakarta.
- Raissa (2016) Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang. <http://e-journal.uajy.ac.id/9749/>.
- Resky Septiyan,2021. Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (Skpd) Kabupaten Bogor)
- Ridwan, W. (2016). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Bogor.Skripsi.Universitas Pakuan
- Rismawati, Tika (2019) Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem

- Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Other Thesis, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Standar Akuntansi Pemerintah nomor 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran.
- Sugiono, 2017. Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen. Yogyakarta.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D. Bandung : Alfabeta.
- Sulfianty, 2021. Pelaksanaan Anggaran Dan Evaluasi Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato
- Sya' Roni. 2018. " Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah". Jurnal Akuntansi, Vol. 5. e- ISSN: 2116-6541
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah. 2004. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia.
- Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.2003.Jakarta: Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.
- Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.2014.Jakarta: Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.
- Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Siklus Perencanaan dan Pembangunan Nasional.2004.
- Utami et, al. 2017. Pengaruh Akuntabilitas, Kesesuaian Kompensasi dan Pengendalian Internal Terhadap Potensi Kecurangan Dana Desa Pada Kelurahan/Desa di Kabupaten Kulon Progo
<https://doi.org/10.36815/prive.v4i2.1256>
- Zahra Fonna. 2022. Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. 1-88

